



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban tahunan atas pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, dan sebagai wujud transparansi serta akuntabilitas publik. Laporan ini sebagai Pertanggungjawaban Akuntabilitas dalam bentuk kewajiban melaporkan pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran kepada publik maupun atasan langsung, dan Evaluasi Kinerja sebagai bahan analisis untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan, sebagai Transparansi Pelayanan yakni Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan informasi yang terukur dan akuntabel mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta Perencanaan Masa Depan dalam membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra/Renja) periode berikutnya agar lebih efektif dan efisien.

Tujuan utama dari penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan, memberikan Informasi Kinerja Terukur, Sarana Evaluasi dan Perbaikan, Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Dasar Perencanaan Masa Depan, Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, akuntabel, dan berorientasi hasil (result-oriented government) diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sidikalang, Februari 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI**



**JASPIN S.L SIHOMBING, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19721004 199801 1 001**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini merupakan dokumen pertanggungjawaban tahunan atas pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, dan sebagai wujud transparansi serta akuntabilitas publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini disusun dalam bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pendidikan yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran OPD yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
 - a. Indeks Rata-rata Lama Sekolah (0,65)
 - b. Indeks Harapan Lama Sekolah (0,74)
 - c. Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (49,76)
 - d. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (99,49)
 - e. Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (1,57)

- f. rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional (66,74)
- g. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional (66,98)
- h. rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional (57,44)
- i. rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional (45,63)
- j. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (14,92)
- k. Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV (40,13)
- l. Indeks iklim keamanan SD (72,57)
- m. Indeks iklim keamanan SMP (67,58)
- n. Indeks iklim kebinekaan SD (69,91)
- o. Indeks iklim kebinekaan SMP (66,80)
- p. Indeks iklim Inklusivitas SD (68,71)
- 17. Indeks iklim Inklusivitas SMP (56,10)

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

a. Predikat AKIP

Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran didukung dana sejumlah Rp.455.839.387.247,- (*Empat Ratus Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi ke depan, sebagai berikut:

1. Dalam internal Dinas Pendidikan Kab. Dairi terdapat SDM fungsional yang tidak melaksanakan tupoksinya secara maksimal sehingga dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan pendidikan mengalami keterlambatan dalam penerapan dan inovasi ke satuan pendidikan.
2. Masih terdapat Guru yang belum terlatih sesuai jenjang pendidikannya;
3. Terdapatnya kepala sekolah yang tidak defenitif alias status pelaksana tugas di satuan Pendidikan;
4. Kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai;
5. Kekurangan bahan belajar dan mengajar sekolah;
6. Mahalnya biaya pendidikan sehingga akan berpengaruh kepada meningkatnya angka putus sekolah.;
7. Kurang meratanya pendistribusian guru;
8. Partisipasi masyarakat tentang pendidikan di daerah ini dirasa relatif kurang, mungkin dilatarbelakangi oleh SDM dan sosial, budaya. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kinerja sasaran dan program.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Pendidikan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, akuntabel, dan berorientasi hasil (result-oriented government) diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sidikalang, Februari 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI**



**JASPIN S.L SIHOMBING, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19721004 199801 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1. Perencanaan Strategis	18
2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Metode Pengukuran Kinerja dan penyimpulan capaian kinerja	
sasaran.....	30
B. Capaian Kinerja Organisasi	32
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Permasalahan	79
B. Solusi	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan tata pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

1.2. Landasan Hukum

Berikut adalah landasan hukum penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) secara hierarkis, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan kepada pihak terkait (publik, DPRD, pemerintah pusat/daerah), menggambarkan pencapaian kinerja (target vs hasil) secara sistematis, menyajikan informasi kinerja yang jelas atas penggunaan APBN/APBD, menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis instansi, dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan efisiensi serta efektifitas kinerja pada tahun berikutnya dan menyediakan data bagi pimpinan untuk merencanakan kinerja yang lebih baik.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Dairi. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), Kepala Dinas dibantu 9 (sembilan) orang Pejabat Struktural terdiri dari Eselon III: 5 orang dan Eselon IV 4 orang dan 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional, yaitu:

1. Sekretariat Dinas terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada sekolah dasar; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi 3 Seksi:
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Sekolah Menengah Pertama; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Dinas Pendidikan membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari : 1). Satuan Pendidik Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 2). Satuan Pendidik SD dan Satuan Pendidik SMP
 - UPT Dinas berupa Satuan Pendidik Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - UPT Dinas yang berbentuk sekolah dipimpin oleh Kepala Sekolah selaku pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel.I.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pengawas / Penilik Dinas Pendidikan Kab. Dairi Tahun 2025

No	Kualifikasi Pangkat	Jmlh (orang)	Kualifikasi Pendidikan	Jmlh (orang)	Kualifikasi Golongan	Jmlh (orang)	Pejabat Struktural Fungsional	Jmlh (orang)
1	Pembina Utama Muda	0	Megister (S2)	4	Gol IV	38	Eselon II	0
2	Pembina Tk.I	30	Sarjana (S1)	52	Gol III	22	Eselon III	5
3	Pembina	9	Diploma IV	-	Gol II	6	Eselon IV	4
4	Penata Tk.I	9	Diploma III	3	Gol I	-	Fungsional :	8
5	Penata	8	Diploma II	-			Pengawas	32
6	Penata Muda Tk.I	4	Diploma I	1			Penilik	2
7	Penata Muda	2	SLTA	5			Staf	15
8	Pengatur Tk.I	3	SLTP	1				
9	Pengatur	2	SD	-				
10	Pengatur Muda Tk.I	0						
11	Pengatur Muda	0						
Jumlah		66		66		66		66

C. GAMBARAN UMUM PELAYANAN ORGANISASI

Tabel 1.2
Keadaan Guru TK/PAUD Tahun 2025

NO	KECAMATAN	GURU PAUD		Total (orang)
		<S1	≥S1	
1	SIDIKALANG	38	53	91
2	SUMBUL	31	9	40
3	TIGALINGGA	23	5	28
4	SIEMPAT NEMPU	16	2	18
5	SILIMA PUNGA PUNGA	17	3	20
6	TANAH PINEM	13	2	15
7	SIEMPAT NEMPU HULU	8	7	15
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	15	0	15
9	PEGAGAN HILIR	10	0	10
10	PARBULUAN	25	7	32
11	LAE PARIRA	12	3	15
12	GUNUNG SITEMBER	7	1	8
13	BERAMPU	3	1	4
14	SILAHISABUNGAN	5	2	7
15	SITINJO	8	24	32
JUMLAH		231	119	350

Pada Tahun 2025 Jumlah Guru TK/PAUD sebanyak 350 orang dimana terbagi Guru TK/PAUD dibawah S1 sebanyak 231 orang dan diatas sama dengan S1 sebanyak 119 orang.

Tabel 1.3
Jumlah Guru SD/MI Tahun 2025

NO	KECAMATAN	SD		MI		Total (orang)
		<S1	≥S1	<S1	≥S1	
1	SIDIKALANG	26	405	-	63	494
2	SUMBUL	32	373	-	-	405
3	TIGALINGGA	26	240	-	16	282
4	SIEMPAT NEMPU	17	184	-	-	201
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	16	138	-	-	154
6	TANAH PINEM	35	199	-	2	236
7	SIEMPAT NEMPU HULU	15	168	-	19	202
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	8	119	-	-	127
9	PEGAGAN HILIR	18	130	-	3	151
10	PARBULUAN	30	201	-	-	231
11	LAE PARIRA	4	134	-	-	138
12	GUNUNG SITEMBER	5	85	-	3	93
13	BERAMPU	2	65	-	20	87
14	SILAHISABUNGAN	3	54	-	-	57
15	SITINJO	8	69	-	11	88
JUMLAH		245	2.564	-	137	2.946

Pada Tahun 2025 Jumlah Guru SD/MI adalah sebanyak 2.946 orang dimana terbagi guru SD dibawah S1 sebanyak 245 orang dan diatas dan sama dengan S1 sebanyak 2.564 orang, pada MI diatas dan sama dengan S1 sebanyak 137 orang.

Tabel 1.4
Jumlah Guru SMP/MTs Tahun 2025

NO	KECAMATAN	SMP		MTs		Total (orang)
		<S1	≥S1	<S1	≥S1	
1	SIDIKALANG	6	216	-	66	288
2	SUMBUL	12	224	-	-	236
3	TIGALINGGA	3	119	-	-	122
4	SIEMPAT NEMPU	1	84	-	-	85
5	SILIMA PUNGA PUNGA	0	54	-	-	54
6	TANAH PINEM	1	78	-	-	79
7	SIEMPAT NEMPU HULU	0	81	-	-	81
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	1	69	-	-	70
9	PEGAGAN HILIR	3	83	-	-	86
10	PARBULUAN	5	132	-	-	137
11	LAE PARIRA	1	45	-	-	46
12	GUNUNG SITEMBER	2	23	-	-	25
13	BERAMPU	3	32	-	-	35
14	SILAHISABUNGAN	4	30	-	-	34
15	SITINJO	0	43	-	-	43
JUMLAH		42	1.313	-	66	1.421

Pada Tahun 2025 Jumlah Guru SMP/MTs adalah sebanyak 1.421 orang, jenjang SMP dibawah S1 sebanyak 42 orang dan diatas sama dengan S1 sebanyak 1.313 orang, pada jenjang MTs diatas sama dengan S1 sebanyak 66 orang.

Tabel 1.5
Jumlah TK/PAUD Tahun 2025

NO	KECAMATAN	Jumlah Lembaga	PAUD		
			N	S	PD
1	SIDIKALANG	28	1	27	1.097
2	SUMBUL	27	1	26	674
3	TIGALINGGA	12	-	12	313
4	SIEMPAT NEMPU	9	-	9	150
5	SILIMA PUNGA PUNGA	13	-	13	119
6	TANAH PINEM	12	-	12	90
7	SIEMPAT NEMPU HULU	10	-	10	128
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	8	-	8	186
9	PEGAGAN HILIR	8	-	8	116
10	PARBULUAN	17	-	17	405
11	LAE PARIRA	8	-	8	149
12	GUNUNG SITEMBER	6	-	6	47
13	BERAMPU	2	-	2	40
14	SILAHISABUNGAN	4	-	4	96
15	SITINJO	10	-	10	291
JUMLAH		174	2	172	3.901

Pada tahun 2025 Jumlah Pendidikan Usia Dini pada tahun 2025 terdapat 2 TK Negeri dan 172 Lembaga Swasta dengan jumlah didik 3.901 orang yang tersebar di 147 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Dairi.

Tabel 1.6
Jumlah SD/MI Tahun 2025

NO	KECAMATAN	SD (unit)		MI (unit)		Total (unit)
		N	S	N	S	
1	SIDIKALANG	22	6	1	2	31
2	SUMBUL	37	4	-	-	41
3	TIGALINGGA	22	0	1	-	23
4	SIEMPAT NEMPU	20	0	-	-	20
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	18	0	-	-	18
6	TANAH PINEM	23	0	-	1	24
7	SIEMPAT NEMPU HULU	16	0	1	1	18
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	15	0	-	-	15
9	PEGAGAN HILIR	19	0	-	-	19
10	PARBULUAN	17	3	-	-	20
11	LAE PARIRA	13	0	-	-	13
12	GUNUNG SITEMBER	9	0	-	1	10
13	BERAMPU	7	0	1	1	9
14	SILAHISABUNGAN	6	0	-	0	6
15	SITINJO	3	2	-	1	6
JUMLAH		247	15	4	7	273

Pada Tahun 2025 terdapat jumlah SD/MI sebanyak 273 unit, SD Negeri 247 unit, dan SD Swasta 15 unit, sedangkan jumlah MI Negeri sebanyak 4 unit dan jumlah MI swasta sebanyak 7 unit.

Tabel 1.7
Jumlah SMP/MTs Tahun 2025

NO	KECAMATAN	SMP		MTs		Total
		N	S	N	S	
1	SIDIKALANG	3	7	1	2	13
2	SUMBUL	5	6	-	-	11
3	TIGALINGGA	3	3	-	-	6
4	SIEMPAT NEMPU	3	0	-	-	3
5	SILIMA PUNGA PUNGA	2	0	-	-	2
6	TANAH PINEM	4	0	-	-	4
7	SIEMPAT NEMPU HULU	3	0	-	-	3
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	3	0	-	-	3
9	PEGAGAN HILIR	3	2	-	-	5
10	PARBULUAN	3	3	-	-	6
11	LAKE PARIRA	1	2	-	-	3
12	GUNUNG SITEMBER	1	0	-	-	1
13	BERAMPU	1	0	-	-	1
14	SILAHISABUNGAN	1	1	-	-	2
15	SITINJO	1	1	-	-	2
JUMLAH		37	25	1	2	65

Pada Tahun 2025 jumlah SMP negeri sebanyak 37 unit dan jumlah SMP Swasta sebanyak 25 unit sedangkan jumlah MTs Negeri sebanyak 1 unit dan MTs Swasta sebanyak 2 unit.

D. RASIO SEKOLAH, RUANG KELAS, SISWA, DAN GURU

❖ Rasio Murid per Guru (R-M/G)

Tabel I.8
Rasio Murid per Guru (R-M/G) SD dan SMP Sederajat Tahun 2025

NO	KECAMATAN	Rasio Murid per guru (R-M/G) SD			Rasio murid guru (R-M/G) SMP		
		Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio
1	SIDIKALANG	7,147	494	14,47	4,647	288	16,14
2	SUMBUL	5,830	405	14,40	3,098	236	13,13
3	TIGALINGGA	2,864	282	10,16	1,561	122	12,80
4	SIEMPAT NEMPU	2,143	201	10,66	1,040	85	12,24
5	SILIMA PUNGA PUNGA	1,708	154	11,09	917	54	16,98
6	TANAH PINEM	2,556	236	10,83	822	79	10,40
7	SIEMPAT NEMPU HULU	1,939	202	9,60	1,093	81	13,48
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	1,534	127	12,08	840	70	12
9	PEGAGAN HILIR	2,148	151	14,23	1,271	86	14,78
10	PARBULUAN	3,817	231	16,52	1,901	137	13,88
11	LAE PARIRA	1,591	138	11,53	852	46	18,52
12	GUNUNG SITEMBER	1,143	93	12,29	252	25	10,08
13	BERAMPU	1,062	87	12,21	430	35	12,29
14	SILAHISABUNGAN	677	57	11,88	366	34	10,76
15	SITINJO	1,362	88	15,48	527	43	12,25
JUMLAH		37,521	3,946	12,49	19,617	1,421	13,32

Sesuai dengan angka-angka di atas dapat ditunjukkan berbagai indikasi pada setiap kecamatan sebagai berikut:

- Untuk tingkat SD dua rasio R-M/G tertinggi adalah di Kecamatan Parbuluan (16,52) dan Kecamatan Sitinjo dengan rasio (15,48) sementara rasio terendah berada di Kecamatan Siempat Nempu Hulu dengan rasio (9,60).
- Untuk tingkat SMP rasio R-M/G tertinggi berada di Kecamatan Lae Parira (18,52), sementara rasio terendah berada di Kecamatan Tanah Pinem (10,20).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kecukupan guru untuk pendidikan dasar secara relatif sudah memadai, tetapi masih ditemukan bahwa di wilayah tertentu seorang guru SD hanya melayani 9 orang siswa. Dan tingkat SMP rata-rata rasio guru siswa adalah 13 siswa, wilayah dengan rasio terendah adalah di Kecamatan Tanah Pinem yaitu 1 orang guru melayani 10 siswa.

❖ **Rasio Murid Per Sekolah (R-M/S)**

Tabel I.9
Rasio Murid per Sekolah (R-M/S) SD dan SMP Sederajat

No.	Kecamatan	rasio murid per guru (R-M/G) SD			rasio murid per guru (R-M/G) SMP		
		Murid	Sekolah	Rasio	Murid	Sekolah	Rasio
1	SIDIKALANG	7,147	31	230,55	4,647	13	357,46
2	SUMBUL	5,830	41	142,20	3,098	12	258,17
3	TIGALINGGA	2,864	23	124,52	1,561	6	260,17
4	SIEMPAT NEMPU	2,143	20	107,15	1,040	3	346,67
5	SILIMA PUNGA PUNGA	1,708	18	94,89	917	2	458,5
6	TANAH PINEM	2,556	24	106,5	822	4	205,5
7	SIEMPAT NEMPU HULU	1,939	18	107,72	1,093	3	364,33
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	1,534	15	102,27	840	3	280
9	PEGAGAN HILIR	2,148	19	113,05	1,271	5	254,2
10	PARBULUAN	3,817	20	190,85	1,901	6	316,83
11	LAE PARIRA	1,591	13	122,38	852	2	426
12	GUNUNG SITEMBER	1,143	10	114,3	252	1	252
13	BERAMPU	1,062	9	118	430	1	430
14	SILAHISABUNGAN	677	6	112,83	366	2	183
15	SITINJO	1,362	6	227	527	2	263,5
	Jumlah	37,521	273	134,28	19,617	65	310,422

Menyimak tabel di atas dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD mencapai 134,28 orang. Akan tetapi terdapat di dua kecamatan dengan jumlah siswa yang paling rendah yaitu Silima Pungga-pungga 94,89 orang.
2. Untuk tingkat SMP rata-rata siswa per sekolah mencapai 310,422 orang, dengan jumlah siswa per sekolah terendah adalah di Kecamatan Silahisabungan yaitu 183 orang dan Kecamatan Tanah Pinem 205,5 orang.

Dari gambaran jumlah siswa persekolah seperti ini dapat ditunjukkan bahwa semakin tinggi rasio siswa dengan sekolah maka semakin efisien PBM di satu sekolah karena semakin intensif pemakaian sumber daya yang ada.

❖ **Rasio Murid Per Kelas (R-M/K)**

Tabel I.10
Rasio Murid per rombongan (R-M/K) SD dan SMP Sederajat

No.	Kecamatan	rasio murid per rombongan (R-M/G) SD			rasio murid per guru (R-M/G) SMP		
		Murid	Rombongan	Rasio	Murid	Rombongan	Rasio
1	SIDIKALANG	7,147	276	25,89	4,647	119	39,05
2	SUMBUL	5,830	285	20,46	3,098	106	29,23
3	TIGALINGGA	2,864	162	17,68	1,561	52	30,02
4	SIEMPAT NEMPU	2,143	128	16,74	1,040	37	28,11
5	SILIMA PUNGA PUNGA	1,708	110	15,53	917	31	29,58
6	TANAH PINEM	2,556	151	16,93	822	30	27,40
7	SIEMPAT NEMPU HULU	1,939	108	17,95	1,093	37	29,54
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	1,534	91	16,86	840	31	27,10
9	PEGAGAN HILIR	2,148	133	16,15	1,271	47	27,04
10	PARBULUAN	3,817	166	22,99	1,901	65	29,25
11	LAE PARIRA	1,591	84	18,94	852	27	31,56
12	GUNUNG SITEMBER	1,143	61	18,74	252	9	28,00
13	BERAMPU	1,062	42	25,29	430	15	28,67
14	SILAHISABUNGAN	677	38	17,82	366	13	18,15
15	SITINJO	1,362	30	45,4	527	20	26,35
	Jumlah	37,521	1.865	20,89	19,617	639	29,27

Dengan mengamati tabel di atas dapat ditunjukkan hal-hal berikut:

- 1) Untuk jenjang pendidikan SD rasio tertinggi ada di Kecamatan Sitinjo (45,4) dan Kecamatan Sidikalang (25,89), sementara terendah ada di Kecamatan Silima Punga-punga (15,53) dan Kecamatan Pegagan Hilir (16,15).
- 2) Untuk jenjang pendidikan SMP rasio tertinggi berada di Kecamatan Sidikalang (39,05) dan Kecamatan Lae Parira (31,56), sementara rasio terendah berada di Kecamatan Silahisabungan (18,15) dan Kecamatan Sitinjo (26,35).

Dengan menyimak lebih dalam angka-angka di atas dan membandingkan dengan tingkat rasio murid perkelas maka kondisi sekolah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas bermakna ganda. Untuk tingkat SD terlihat bahwa tidak ada kecamatan yang dapat memenuhi ketercukupan siswa di kelas dengan rasio standar bahwa satu kelas dapat ditempati oleh 28 siswa untuk SD sedangkan untuk SMP hanya Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Lae Parira yang sudah terpenuhi 32 siswa untuk SMP. Di sisi lain, angka ini juga menggambarkan bahwa untuk tingkat SD didapat gejala kekurangan murid, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa terendah mencapai 15,53 dan 16,15 untuk masing-masing kecamatan Silima Pungga-pungga dan Pegagan Hilir yang seharusnya jumlah minimal siswa perkelas untuk SD sebanyak 28 siswa dan SMP sebanyak 32 siswa berdasarkan pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Kekurangan murid di sisi lain juga secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan rasio murid dengan kelas rendah. Artinya ruang dan fasilitas yang juga dapat disebut sarana dan prasarana belum termanfaatkan secara maksimal.

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu – isu strategis pendidikan berdasarkan tupoksi adalah program pendidikan yang urgent dan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan berdasarkan pada kondisi obyektif yang mendesak untuk diatasi dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Isu strategis pendidikan di Kabupaten Dairi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas guru
2. Masih kurangnya akses pendidikan
3. Masih rendahnya pendidikan inklusi
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap PAUD dan kesetaraan
5. Masih ditemukan kekerasan di satuan pendidikan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen tahunan yang disusun instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan. LKjIP merupakan komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Perencanaan Strategis (Renstra) adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memuat kegiatan strategis yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan sekaligus merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka sistem pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi merupakan dokumen perencanaan komprehensif dua tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan

Rencana Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pendidikan, yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), disusun untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menaikkan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Dairi, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan pendidikan untuk kurun waktu 2025-2026. Berikut adalah tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 :

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1. Indeks Rata-rata Lama Sekolah 2. Indeks Harapan Lama Sekolah 3. Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD 4. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 5. Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan

				pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 6. rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional 7. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional 8. rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional 9. rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional 10. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B 11. Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV 12. Indeks iklim keamanan SD 13. Indeks iklim keamanan SMP 14. Indeks iklim kebinekaan SD 15. Indeks iklim kebinekaan SMP 16. Indeks iklim Inklusivitas SD 17. Indeks iklim Inklusivitas SMP
--	--	--	--	--

A. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode dua tahunan merupakan penjabaran dari visi-misi Pemerintah Kabupaten Dairi yang spesifik dan terukur. Hasil yang dicapai merupakan ukuran tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, rumusan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi :

Tabel II.2
Matriks Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$
		Indeks Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$
		Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan

		Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang
		rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
		Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
		rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
		rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi

		Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV	Jumlah guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dibagi dengan jumlah guru PAUD
		Indeks iklim keamanan SD	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
		Indeks iklim keamanan SMP	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
		Indeks iklim kebinekaan SD	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
		Indeks iklim kebinekaan SMP	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
		Indeks iklim Inklusivitas SD	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
		Indeks iklim Inklusivitas SMP	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar

B. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2025)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2026. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, dan akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun. Gambaran secara utuh bagaimana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel.II.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun Kinerja 2025

NO	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	0,65
2	Indeks Harapan Lama Sekolah	0,74
3	Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	49,76
4	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	99,49
5	Jumlah warga negara 16-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	1,57
6	rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	66,74
7	Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	66,98
8	rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional	57,44
9	rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	45,63
10	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	14,92
11	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV	40,13

12	Indeks iklim keamanan SD	72,57
13	Indeks iklim keamanan SMP	67,58
14	Indeks iklim kebinekaan SD	69,91
15	Indeks iklim kebinekaan SMP	66,80
16	Indeks iklim Inklusivitas SD	68,71
17	Indeks iklim Inklusivitas SMP	56,10

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel.II.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Realisasi Target				Rumus Perhitungan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak sekolah	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Harapan Sekolah Lama	-	-	-	13,74	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
			Rata-rata Sekolah Lama	-	-	-	9,9	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_i^n x_i$
			Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	-	-	-	65,17	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
			Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	-	-	-	70,15	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam

								jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
			Rata-Rata Kemampuan Numerasi Berdasarkan Assesmen Nasional SD	-	-	-	61,22	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
			Rata-Rata Kompetensi Numerasi Berdasarkan Assesmen Nasional SMP	-	-	-	64,71	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
			Persentase anak usia 5-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	-	-	-	0,18	Jumlah anak disabilitas usia 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak disabilitas usia 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun
			Indeks Pemerataan Guru	100	100	100	100	$IPG = 1 - \frac{1}{2n-p} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (Kecukupan Guru_{ij} - Kecukupan Guru_{ji})$ $Kecukupan Guru_{ij} = \frac{\text{Guru Tersedia Sekolah Neg}}{\text{Kebutuhan Guru Sekolah Ne}}$

			Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	5,29	7,39	7,49	7,59	Jumlah guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru PAUD
			Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik	36,29	37,29	38,29	39,29	Jumlah guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru SD/MI
			Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik	60,83	61,83	62,53	62,83	Jumlah guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru SMP/MTs
			Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal dibagi dengan jumlah satuan pendidikan
			Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	-	54,83	-	54,83	Jumlah Satuan Pendidikan yang belum memiliki izin dibagi dengan jumlah satuan Pendidikan yang sudah berizin
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	-	62,87	-	62,87	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan

			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	-	99,2	-	99,2	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	-	5,02	-	5,02	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
			Persentase jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	-	31,63	-	31,63	Jumlah satuan PAUD yang belum akreditasi B dibagi dengan jumlah satuan PAUD
			Persentase guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	45,237	46,237	47,237	48,237	Jumlah guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dibagi dengan jumlah guru PAUD
			Iklim inklusivitas SD	-	-	-	65,57	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
			Iklim inklusivitas SMP	-	-	-	60,38	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan

								survei lingkungan belajar
			Iklm keamanan SD	-	-	-	78,51	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
			Iklm keamanan SMP	-	-	-	71,73	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
			Iklm kebhinekaan SD	-	-	-	73,72	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
			Iklm kebhinekaan SMP	-	-	-	73,34	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar

No	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	800.323.814
2	Program pengelolaan Pendidikan	Rp.	89,886,373,538
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	1,210,048,280
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp.	18,084,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi selaku Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi wajib untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Metode Pengukuran Kinerja dan Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2025-2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun cara melakukan pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan pertimbangan:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Adapun kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk. Rumus yang dipakai yaitu:

$$\% \text{ Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

% Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
> 95% s/d 100%	Sangat Berhasil
> 80 s/d 95%	Berhasil
> 50 s/d 80%	Cukup Berhasil
< 50	Tidak Berhasil

B. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran.

Salah satu komponen dalam pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Nilai IPM dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan standar hidup yang layak. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya.

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target Renstra 2025	Capaian Renstra 2025	Formulasi
1	Dinas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	70,55	71,24	100,98	69,93	100,98	$I_{pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$
		Nilai SAKIP		B	BB	-	-	-	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pendidikan sudah mencapai target yang telah ditentukan. Formulasi Indeks Pendidikan adalah Rerata dari penjumlahan Indeks Harapan Lama dengan Indeks Rata-rata lama sekolah.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Target Indeks Pendidikan tahun 2025 sebesar 70,55 dan realisasi Indeks Pendidikan pada tahun 2025 mencapai 71,24 sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100,98 %. Dibandingkan dengan realisasi indeks

pendidikan pada tahun 2024 sebesar 70,55 memperoleh peningkatan sebesar 0,69 poin. Hal ini berdampak baik bagi kualitas pendidikan di Kabupaten Dairi. Meskipun indeks pendidikan setiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi permasalahan selalu timbul. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kab. Dairi adalah bahwa Indeks Pendidikan Kab. Dairi belum dapat dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan "Dairi dalam Angka" belum publish di website BPS Kabupaten Dairi. Berikut dijelaskan rumus dari hasil perhitungan Indeks rata-rata lama sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah sehingga diperoleh Indeks Pendidikan.

IHLS	=	$\frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	=	$\frac{13,54-0}{18-0}$	=	$\frac{13,54}{18}$	=	0,752222222
IRLS	=	$\frac{RLS - RLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	=	$\frac{10,09-0}{15-0}$	=	$\frac{10,09}{15}$	=	0,672666667
Indeks Pendidikan	=	$\frac{IHLS + IRLS}{2}$	=	$\frac{0,752222222+0,672666667}{2}$	=	0,7124x100	=	71,24

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pendidikan adalah Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang.

Analisis Keberhasilan

Rata-rata lama sekolah Kab. Dairi tahun 2025 mencapai 10,09 dan Angka Harapan Lama sekolah sebesar 13,54 sementara pada tahun sebelumnya angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,89 dan Harapan lama sekolah mencapai 13,53. Data masih diadopsi dari BPS Kab. Dairi. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi. Hal ini berarti, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan, maka Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Dairi akan menurun. Hal tersebut akan secara otomatis menambah pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Dairi pada umumnya.

Dari Tabel dan Grafik Angka Rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan Lama sekolah dari tahun 2020 ke tahun 2025 mengalami kenaikan. Artinya analisis keberhasilannya sangat berhasil. Angka rata-rata lama sekolah Pada tahun 2020 sebesar 9,54 pada tahun 2021 sebesar 9,58 pada tahun 2022 sebesar 9,72 pada tahun 2023 sebesar 9,88 dan pada tahun 2025 sebesar 10,09. Berikut di bawah ini tabel dan grafik angka rata-rata lama sekolah:

Tabel dan Grafik angka rata-rata lama sekolah:

No.	Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah
1	2020	9,54
2	2021	9,58
3	2022	9,71
4	2023	9,82
5	2024	9,93
6	2025	10,09



Angka harapan lama sekolah Pada tahun pada tahun 2020 sebesar 13,10 pada tahun 2021 sebesar 13,11 pada tahun 2022 sebesar 13,24 pada tahun 2023 sebesar 13,32 pada tahun 2024 sebesar 13,53 dan pada tahun 2025 sebesar 13,54. Artinya analisis keberhasilannya sangat berhasil. Berikut di bawah ini tabel dan grafik angka Harapan Lama Sekolah sekolah:

Tabel dan Grafik angka Harapan lama sekolah:

No.	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah
1	2020	13,1
2	2021	13,11
3	2022	13,24
4	2023	13,32
5	2024	13,53
6	2025	13,54



Dari hasil di atas dapat di hitung jumlah indeks rata-rata lama dan harapan lama sekolah sehingga diperoleh nilai Indeks Pendidikan pada Kabupaten Dairi. Indeks Pendidikan adalah penggabungan dari hasil dari penjumlahan variabel indeks rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berikut di bawah ini tabel dan grafik Indeks Pendidikan Kab. Dairi beserta Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara :

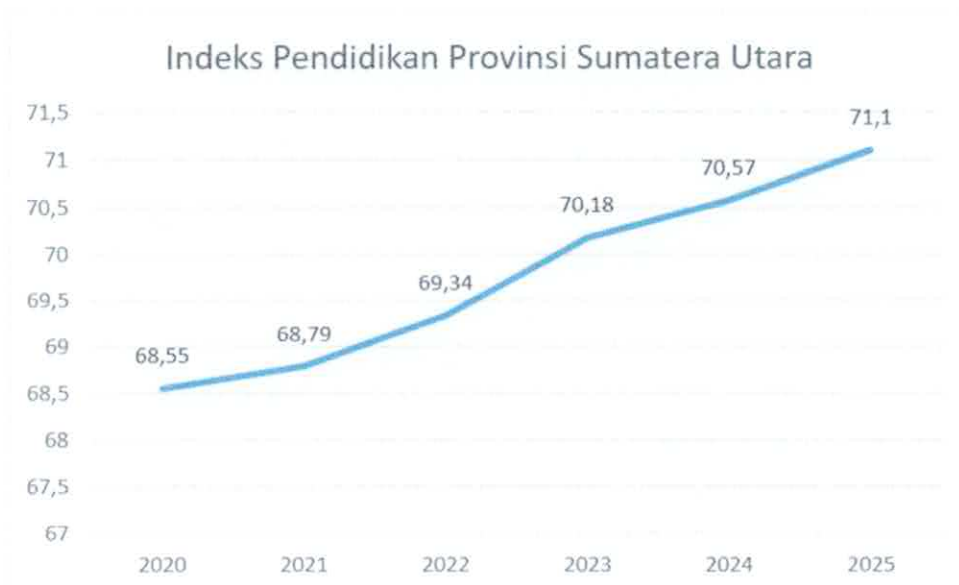
Tabel dan Grafik Indeks Pendidikan Kab. Dairi:

No.	Tahun	Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi
1	2020	68,23
2	2021	68,38
3	2022	69,17
4	2023	69,93
5	2024	70,55
6	2025	71,24



Tabel dan Grafik Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara :

No.	Tahun	Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
1	2020	68,55
2	2021	68,79
3	2022	69,34
4	2023	70,18
5	2024	70,57
6	2025	71,10



Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan Kab. Dairi dan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Indeks Pendidikan Kab. Dairi setiap tahunnya mengalami kenaikan namun jika dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pendidikan Kab. Dairi masih kategori rendah.

Pada tahun 2020 Indeks Pendidikan Kab. Dairi sebesar 68,23 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,55 poin dengan selisih sebesar 0,32 poin. Pada tahun 2021 Indeks Pendidikan Kab. Dairi sebesar 68,38 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,79 poin dengan selisih sebesar 0,41 poin. Pada tahun 2022 Indeks Pendidikan Kab. Dairi sebesar 69,17 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,34 poin dengan selisih sebesar 0,17 poin. Pada tahun 2023 Indeks Pendidikan Kab. Dairi sebesar 69,93 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 70,18 poin dengan selisih sebesar 0,25 poin. Pada tahun

2024 Indeks Pendidikan Kab. Dairi sebesar 70,55 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 70,57 poin dengan selisih sebesar 0,02 poin. Pada tahun 2025 Indeks Pendidikan Kab. Dairi sebesar 71,24 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 71,10 poin dengan selisih sebesar 0,14 poin. Indeks Pendidikan Kab. Dairi pada Tahun 2025 lebih tinggi dari Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi ini menandakan bahwa Kabupaten Dairi khususnya Dinas Pendidikan memiliki kinerja pembangunan sumber daya manusia yang unggul dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, bahkan menjadi pendorong utama (driver) rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Dan kondisi ini juga bermakna bahwa dimana pencapaian kualitas, akses, dan rata-rata lamanya pendidikan penduduk di Kabupaten Dairi melampaui rata-rata pencapaian pendidikan di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Selisih perbandingan nilai poin tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,41 poin sedangkan perbandingan selisih poin terendah pada tahun 2024 dengan poin sebesar 0,02 poin.

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi di bidang pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah karena hal ini merupakan amanat dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada terutama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/D) juga ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain indeks pendidikan, komponen penyusun IPM adalah Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. IPM lebih komprehensif dalam mengukur tingkat keberhasilan dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibandingkan dengan indikator Pendapatan Domestik Bruto/Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) yang hanya mencakup aspek ekonomi saja.

Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pendidikan telah banyak melakukan upaya dalam meningkatkan Indeks Pendidikan yakni terimplementasi dalam penganggaran Program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan baik dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru, Penambahan Unit sekolah baru, Penambahan Ruang Kelas baru, Pengadaan sarana prasarana sekolah dan lain sebagainya sebagai upaya penuntasan angka kemiskinan.

Demikian halnya masih banyak sektor pendidikan yang harus dibenahi mulai dari sumber daya manusianya, media sarana prasarananya maupun siswa sebagai objek pendidikan. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi serta komitmen Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Dairi melalui penyaluran anggaran yang lebih konsekn terhadap pendidikan di Kabupaten Dairi. Masalah yang timbul dalam dunia pendidikan adalah merupakan hambatan dalam peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Dairi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam dunia pendidikan di Kab. Dairi

antara lain:

- a. Rendahnya pemerataan/pendistribusian guru;
- b. Terbatasnya akses Pendidikan;
- c. Rendahnya kualitas guru;
- d. Belum maksimalnya Pendidikan Karakter di sekolah;
- e. Belum memadainya sarana prasarana pembelajaran di sekolah;
- f. Kebijakan Pendidikan dari pusat yang selalu fleksibel;
- g. Ketidakmumpuninya SDM dalam penguasaan Teknologi.

Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kab. Dairi melalui Dinas Pendidikan sebagai Solusi dalam pemecahan masalah yang timbul adalah:

- a. Melakukan sosialisasi serta pelatihan bagi guru/tenaga pendidik dalam upaya peningkatan kompetensi.
- b. Melakukan sosialisasi pendidikan karakter kepada guru maupun siswa dalam bentuk kegiatan yang mengundang narasumber pada ahli karakter.
- c. Pembangunan, rehabilitasi ruang kelas sekolah serta pengadaan sarana dan prasaran sekolah secara merata di seluruh sekolah se kabupaten dairi.
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan pusat yang selalu update setiap ada perubahan
- e. Melakukan lomba kreatifitas bagi guru maupun siswa dalam peningkatan SDM serta minat siswa dalam pengembangan talenta.

Masalah-masalah yang timbul akan menciptakan strategi dan arah kebijakan dalam penuntasan masalah-masalah di atas sehingga muncul program kegiatan pada Dinas Pendidikan sebagai upaya dalam mengurai masalah-masalah diatas.

Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan untuk mengurai masalah-masalah tersebut ada sebanyak 3 (tiga) Program antara lain: Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian perizinan pendidikan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis Dinas Pendidikan yaitu peningkatan mutu pendidikan anak usia sekolah di Kabupaten Dairi didukung melalui ketercapaian 24 indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Rata-rata Lama Sekolah
2. Indeks Harapan Lama Sekolah
3. Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD
4. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
5. Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan
6. rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional
7. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional
8. rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan

asesmen nasional

9. rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional
10. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
11. Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV
12. Indeks iklim keamanan SD
13. Indeks iklim keamanan SMP
14. Indeks iklim kebinekaan SD
15. Indeks iklim kebinekaan SMP
16. Indeks iklim Inklusivitas SD
17. Indeks iklim Inklusivitas SMP

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan anak usia sekolah.

Tabel III.1
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Renstra 2026	Capaian Renstra 2026 (%)
					Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	N/A	0,65	0,67	103,08	0,67	100
2			Indeks Harapan Lama Sekolah	N/A	0,74	0,75	101,35	0,76	101,33

			dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional			77,78	116,54	89,96	
7			Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	66,98	73,9	110,33	85,49	115,68
8			rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional	N/A	57,44	78,96	137,47	91,55	115,94
9			rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	45,63	72,59	159,08	58,72	80,89
10			Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang	N/A	14,92		145,31	18,66	116,20

			mendapatk an minimal akreditasi B			21,68			
11			Pertumbuh an pendidik PAUD dengan S1/DIV	N/A	40,13	34,00	84,72	40,81	120,03
12			Indeks iklim keamanan SD	N/A	72,57	77,6	106,93	81,23	104,68
13			Indeks iklim keamanan SMP	N/A	67,58	70,23	103,92	68,3	97,25
14			Indeks iklim kebinekaan SD	N/A	69,91	72,71	104,01	81,04	111,46
15			Indeks iklim kebinekaan SMP	N/A	66,80	72,34	108,29	74,17	102,53
16			Indeks iklim Inklusivitas SD	N/A	68,71	63,07	91,79	75,77	120,14
17			Indeks iklim Inklusivitas SMP	N/A	56,10	57,97	103,33	59,49	102,62

- **IKSS 1.1 “Indeks Rata-rata Lama Sekolah”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indeks rata-rata lama sekolah yang ditetapkan sebesar 0,64. Dan pada tahun 2025 angka Indeks rata-rata lama sekolah sebesar 0,67.

Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 103,08% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**.



Keterangan foto: pemberian bantuan pendidikan beasiswa berprestasi

- **IKSS 1.2 “Indeks Harapan Lama Sekolah”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indeks harapan lama sekolah yang ditetapkan sebesar 0,74. Dan pada tahun 2025 angka Indeks harapan lama sekolah sebesar 0,75. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 101,35% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**.



Keterangan foto: kegiatan verval ATS, DO, LTM se-desa Kab. Dairi

- **IKSS 1.3 “Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD”**

tingkat ketercapaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan. Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD yang ditetapkan sebesar 49,76. Dan pada tahun 2025 angka Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD sebesar 48,59. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 97,65 % dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **berhasil**. Pada Tahun 2025 jumlah Masyarakat Kabupaten Dairi yang memiliki usia 5-6 tahun adalah sebanyak 11.001 orang dan jumlah Masyarakat Kab. Dairi yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah sebanyak 5.345 orang.

Untuk keberhasilan Program Pengelolaan Pendidikan Bidang Pengelolaan PAUD dan Non formal didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
A	Pengelolaan Pendidikan Bidang PAUD dan Non formal		
1	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 kegiatan	1 kegiatan
2	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	100 Orang	100 Orang
3	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	202 satuan pendidikan	202 satuan pendidikan
4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang
6	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	170 orang	170 orang
7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	126 lembaga	126 lembaga

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
A	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar		
1	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	9 unit	49 unit
2	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1 ruang	1 ruang
3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	14 ruang	14 ruang
5	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	30 ruang	30 ruang
6	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	20 unit	18 unit
7	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD	16 Paket	16 Paket
8	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	261 SD	261 SD
9	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	261 SD	261 SD
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50 orang	50 orang
11	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	261 SD	261 SD
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	261 SD	261 SD
13	Pengadaan Mebel	700 paket	700 paket
B	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama		
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru	1 unit	1 unit
2	Penambahan ruang kelas baru	3 ruang	3 ruang
3	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	14 ruang	14 ruang
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 unit	6 unit
5	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	62 sekolah	62 sekolah
6	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	3 kegiatan	3 kegiatan
7	Pengelolaan dana BOS SMP	62 satuan pendidikan	62 satuan pendidikan
8	Pembangunan Laboratorium	2 ruang	2 ruang
9	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	6 unit	6 unit
10	Pengadaan Mebel Sekolah	160 paket	160 paket
11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	75 Peserta	75 Peserta
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	62 satuan	62 satuan
13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen
14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 kegiatan	1 kegiatan

- **IKSS 1.4 “Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar”** tingkat ketercapaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar yang ditetapkan sebesar 99,49. Dan pada tahun 2025 angka Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar sebesar 85,43. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 85,87% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **berhasil**. Pada Tahun 2025 jumlah masyarakat Kab. Dairi yang memiliki usia 7-15 tahun adalah sebanyak 60.241 orang dan jumlah masyarakat Kab. Dairi usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar adalah sebanyak 51.462 orang.

Untuk keberhasilan Program Pengelolaan Pendidikan Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) didukung oleh kegiatan sebagai berikut:



Keterangan foto: Kegiatan Fisik Sekolah Dasar

- **IKSS 1.5 “Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan sebesar 1,57. Dan pada tahun 2025 Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam

Pendidikan Kesetaraan sebesar 11,17. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 711,46% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. Pada Tahun 2025 jumlah masyarakat Kab. Dairi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan adalah sebanyak 250 orang dan jumlah masyarakat Kab. Dairi usia 7-18 tahun yang putus sekolah sebanyak 685 orang sementara jumlah masyarakat Kab. Dairi usia 7-18 tahun yang tidak melanjutkan sebanyak 801 orang.

Untuk keberhasilan Program Pengelolaan Pendidikan Bidang Pengelolaan PAUD dan Non formal didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
A	Pengelolaan pendidikan non formal/ Kesetaraan		
1	Penyelenggaraan proses belajar non formal/ Kesetaraan	202 satuan pendidikan	202 satuan pendidikan
2	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Nonformal/Kesetaraan	3 satuan pendidikan	3 satuan pendidikan
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3 satuan pendidikan	3 satuan pendidikan

- **IKSS 1.6 “rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional yang ditetapkan sebesar 66,74. Dan pada tahun 2025 rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 77,78. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 116,54% dan

kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. (data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen).



Keterangan foto: Kegiatan English for Dairi jenjang SD tahun 2025

- **IKSS 1.7 “Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional yang ditetapkan sebesar 66,98. Dan pada tahun

2025 angka Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 73,9. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 110,33% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. (data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen).



Keterangan foto: kegiatan FLS3N jenjang SD dan SMP

- **IKSS 1.8 “rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional yang ditetapkan sebesar 57,44. Dan pada tahun 2025 rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional sekolah sebesar 78,96. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 137,47% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. (data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen).



Keterangan foto: kegiatan sosialisasi ANBK jenjang SD

- **IKSS 1.9 “rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional yang ditetapkan sebesar 45,63. Dan pada tahun 2025 angka rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 72,59. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 159,08 % dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. *(data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen).*



Keterangan foto: kegiatan OSN jenjang SMP

- **IKSS 1.10 “Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B yang ditetapkan sebesar 14,92. Dan pada tahun 2025 Peningkatan proporsi

jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B sebesar 18,40. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 123,32% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. Pada Tahun 2025 jumlah satuan PAUD yang memiliki akreditasi minimal B adalah sebanyak 31 lembaga.

Tabel III.2 Daftar Akreditasi PAUD Tahun 2025

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Kecamatan	Akreditasi
1	PAUD ARIH ERSADA	69909342	KB	Gunung Stember	B
2	KB PEMULIHAN	69859005	KB	Parbuluan	B
3	TK YBTI UNIVERSAL NAINGGOLAN	69858999	KB	Parbuluan	B
4	KB PAUD KARTINI	69966999	KB	Pegagan Hilir	B
5	KB EKKLESIA	69858985	KB	Sidikalang	B
6	PAUD CEMERLANG	70000300	KB	Sidikalang	B
7	TK KEMALA BHAYANGKARI SIDIKALANG	10262075	TK	Sidikalang	B
8	TK MULIA PLUS	69957345	TK	Sidikalang	B
9	TK PLUS ARK	69992029	TK	Sidikalang	B
10	TK SANTA MARIA	69858974	TK	Sidikalang	B
11	TK SWASTA KARTIKA I-47	10262078	TK	Sidikalang	B
12	TK SWASTA PKMI SIDIKALANG	69893718	TK	Sidikalang	B
13	UPT TK NEGERI PEMBINA SIDIKALANG	10262072	TK	Sidikalang	A
14	YBTI UNIVERSAL SIDIKALANG	69858991	KB	Sidikalang	B
15	KB MAJU SUNGAI RAYA	69859028	KB	Siempat Nempu Hulu	B
16	KB PAUD Harapan Bangsa	70049352	KB	Siempat Nempu Hulu	B
17	PAUD GRACIA SILALAH	10262085	TK	Silahi Sabungan	B
18	KB STAR GENERATION	70005510	KB	Silima Pungga-Pungga	B
19	TK GRACE PARONGIL	10262086	TK	Silima Pungga-Pungga	B
20	PAUD BUNDA	69933097	KB	Sitinjo	B
21	TK CAHAYA NEGERI	69992696	TK	Sitinjo	B
22	KB EIRENE	69859014	KB	Sumbul	B
23	KB PASADA ARIH	69859009	KB	Sumbul	B
24	KB PAUD DOLOK TOLONG	70047651	KB	Sumbul	B

25	PAUD MARGARETAS KASIH BANGSA	69909105	KB	Sumbul	B
26	PAUD TUNAS HARAPAN	69943341	KB	Sumbul	B
27	TK KARINA SUMBUL	69829181	TK	Sumbul	B
28	TK SANTA ANA SUMBUL	10262083	TK	Sumbul	B
29	UPT TK NEGERI PEMBINA SUMBUL	10262081	TK	Sumbul	B
30	KB PAUD SANTA MARIA TIGALINGGA	69967242	KB	Tigalingga	B
31	PKBM HARAPAN	P9997070	PKBM	Tigalingga	B



Keterangan foto: Kegiatan Akreditasi jenjang PAUD

- **IKSS 1.11 “Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV”** tingkat ketercapaiannya tidak mencapai dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV yang ditetapkan sebesar 40,13. Dan pada tahun 2025 angka Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV sebesar 34,00. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 84,72% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **berhasil**.



Keterangan foto: Bimtek guru PAUD

- **IKSS 1.12 “Indeks iklim keamanan SD”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indeks iklim keamanan SD yang ditetapkan sebesar 72,57. Dan pada tahun 2025 angka Indeks iklim keamanan SD sekolah sebesar 77,6. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 106,93 % dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. (data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen).



Keterangan foto: kegiatan ULD pada jenjang SD

- **IKSS 1.13 “Indeks iklim keamanan SMP”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indeks iklim keamanan SMP yang ditetapkan sebesar 67,58. Dan pada tahun 2025 angka Indeks iklim keamanan SMP sebesar 70,23. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 103,92% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. *(data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen).*



Keterangan foto: kegiatan ULD jenjang SMP

- **IKSS 1.14 “Indeks iklim kebinekaan SD”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indeks iklim kebinekaan SD yang ditetapkan sebesar 69,91. Dan pada tahun 2025 angka Indeks iklim kebinekaan SD sebesar 72,71. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 104,01% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. *(data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen)*.
- **IKSS 1.15 “Indeks iklim kebinekaan SMP”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indeks iklim kebinekaan SMP yang ditetapkan sebesar 66,80. Dan pada tahun 2025 angka Indeks iklim kebinekaan SMP sebesar 72,34. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 108,29% dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. *(data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen)*.
- **IKSS 1.16 “Indeks iklim Inklusivitas SD”** tingkat ketercapaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan. Indeks iklim Inklusivitas SD yang ditetapkan sebesar 68,71. Dan pada tahun 2025 angka Indeks iklim Inklusivitas SD sebesar 63,07. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 91,79 % dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **berhasil**. *(data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen)*.
- **IKSS 1.17 “Indeks iklim Inklusivitas SMP”** tingkat ketercapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indeks iklim Inklusivitas SMP yang ditetapkan sebesar 56,10. Dan pada tahun 2025 angka Indeks iklim Inklusivitas SMP sebesar 57,97. Dengan demikian persentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 103,33%

dan kesimpulan capaian predikat kinerja **IKSS** adalah **sangat berhasil**. (data diambil dari rapor pendidikan kemendikdasmen).

Tabel III.3
Capaian Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	N/A	0,65	0,67	103,08
2			Indeks Harapan Lama Sekolah	N/A	0,74	0,75	101,35
3			Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	N/A	49,76	48,59	97,65
4			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	N/A	99,49	85,43	85,87
5			Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	N/A	1,57	11,17	711,46
6			rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	66,74	77,78	116,54

7			Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	66,98	73,9	110,33
8			rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional	N/A	57,44	78,96	137,47
9			rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	45,63	72,59	159,08
10			Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	N/A	14,92	21,68	145,31
11			Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV	N/A	40,13	34,00	84,72
12			Indeks iklim keamanan SD	N/A	72,57	77,6	106,93
13			Indeks iklim keamanan SMP	N/A	67,58	70,23	103,92
14			Indeks iklim kebinekaan SD	N/A	69,91	72,71	104,01

15			Indeks iklim kebinekaan SMP	N/A	66,80	72,34	108,29
16			Indeks iklim Inklusivitas SD	N/A	68,71	63,07	91,79
17			Indeks iklim Inklusivitas SMP	N/A	56,10	57,97	103,33
CAPAIAN KINERJA SASARAN							134,97
KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN							SANGAT BERHASIL

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2025 dapat disimpulkan **sangat berhasil** dengan capaian kinerja 134,97 % dan kearah positif menuju target 2026. Program-program yang mendukung adalah :

1. Program pengelolaan pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengendalian perizinan pendidikan
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

C. REALISASI ANGGARAN

Tabel III.4 Realisasi anggaran Tahun 2025

NO	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (seluruhnya)	Realisasi	Sisa Pagu
I	Dinas Pendidikan	455.839.387.247	438.806.585.415	17.032.801.832
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	455.839.387.247	438.806.585.415	17.032.801.832
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	361.773.869.476	349.950.052.788	11.823.816.688
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	92.829.131.821	88.322.180.070	4.506.951.751
C	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.208.354.950	521.805.557	686.549.393
D	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	28.031.000	2.600.000	25.431.000

Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*). Anggaran kinerja sangat memperhatikan time value of money, yang mengandung arti bahwa sumber daya keuangan harus dikelola.

Berikut penjabaran realisasi kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi baik belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	0,65	0,67	103,08	455.839.387.247	438.806.585.415	96,26%
			Indeks Harapan Lama Sekolah	0,74	0,75	101,35			
			Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	49,76	48,59	97,65			
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	99,49	85,43	85,87			
			Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	1,57	11,17	711,46			

			aikan pendidika n dasar Dan atau menenga h yang berpartisip asi dalam Pendidika n Kesetaraa n						
			rerata kemampu an literasi sekolah dasar (SD) berdasark an Asesmen Nasional	66,74	77,78	116, 54			
			Rerata kompeten si literasi sekolah menenga h pertama (SMP) berdasark an Asesmen Nasional	66,98	73,9	110, 33			
			rerata kemampu an numerasi sekolah dasar (SD)	57,44	78,96	137, 47			

			berdasarkan asesmen nasional						
			rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	45,63	72,59	159,08			
			Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	14,92	21,68	145,31			
			Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV	40,13	34,00	84,72			
			Indeks iklim keamanan SD	72,57	77,6	106,93			

			Indeks iklim keamanan SMP	67,58	70,23	103,92			
			Indeks iklim kebinekaan SD	69,91	72,71	104,01			
			Indeks iklim kebinekaan SMP	66,80	72,34	108,29			
			Indeks iklim Inklusivitas SD	68,71	63,07	91,79			
			Indeks iklim Inklusivitas SMP	56,10	57,97	103,33			

Tabel III.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2025

NO	NAMA KEGIATAN	BELANJA		DEVIASI %
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	361.773.869.476	349.950.052.788	3,27
2	Program pengelolaan Pendidikan	92.829.131.821	88.322.180.070	4,86
3	Program pengendalian perizinan Pendidikan	28.031.000	2.600.000	90,72
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.208.354.950	521.805.557	56,80
Total Daya Serap Dinas Pendidikan		455.839.387.247	438.806.585.415	38,91

Tabel III.7
Analisa Efisiensi

N O	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Serapan Anggaran %	Tingkat Inefisiensi
1	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	134,97	96,26	38,71
			Indeks Harapan Lama Sekolah			
			Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD			
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar			
			Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi			

			dalam Pendidikan Kesetaraan			
			rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional			
			Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional			
			rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional			
			rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan			

			Asesmen Nasional			
			Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B			
			Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV			
			Indeks iklim keamanan SD			
			Indeks iklim keamanan SMP			
			Indeks iklim kebinekaan SD			
			Indeks iklim kebinekaan SMP			
			Indeks iklim Inklusivitas SD			
			Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar			

Berdasarkan tabel III.6, terdapat 2 (dua) program yang memiliki deviasi lebih dari 10%. Artinya ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan kemungkinan ini akan menimbulkan ketidakmaksimalnya pencapaian SPM pada Dinas Pendidikan Kab. Dairi. Adapun kegiatan tidak tercapai karena ada beberapa sub kegiatan fisik yang mengalami KDP dan UJP pada bulan Desember 2025. Dan Kegiatan BCKS pada Bidang PTK yang tidak jadi dilaksanakan karena perubahan kebijakan pelaksanaan. Hal ini Pada tahun 2025 ada beberapa kegiatan yang seharusnya mampu menunjang pencapaian kinerja program yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025. Pencapaian kinerja program belum maksimal dikarenakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Tabel III.7, terdapat inefisiensi sebesar 38,71 % antara serapan anggaran dengan capaian kinerja. Dimana capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 134,97 dan serapan anggaran sebesar 96,28%. Sesuai amanat presiden RI setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap instansi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah. Berdasarkan tabel III.7 dapat kita perhatikan bahwa Dinas Pendidikan Kab. Dairi telah mampu menekan angka inefisiensi sehingga setiap program kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 terimplementasi kepada kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Melihat kondisi pada tahun 2025 masih diperlukan banyak perbaikan supaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Banyak faktor-faktor dan indikasi masih terjadinya inefisiensi diharapkan ke tahun 2025 Dinas Pendidikan akan lebih mempertajam program dan kegiatannya. Dinas Pendidikan juga diharapkan mampu menyelaraskan antara

perencanaan dengan serapan anggaran dan mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga hal ini akan disamping menekan angka inefisiensi juga akan menghasilkan birokrasi berorientasi hasil.

Perlu kami jelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang menunjang pelayanan minimal (SPM) yang tidak dialokasikan pada anggaran Program-program kegiatan pada tahun 2025. Hal ini juga berpengaruh pada capaian kinerja yang dominan lebih tinggi dari serapan anggaran. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan SPM Dinas Pendidikan adalah pelaksanaan program prioritas kemendikbudristek melalui BBGP yakni adanya sosialisasi dan penekanan-penekanan dalam peningkatan mutu di bidang pelayanan dasar sekolah dasar yaitu PAUD, SD dan SMP. Kondisi status kepala sekolah di Kabupaten Dairi terdapat banyak menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah dikarenakan kepala sekolah banyak yang pensiun. Hal ini juga dapat menjadi kendala pencapaian **kinerja SPM Dinas Pendidikan dan berpotensi menurunkan kualitas manajemen sekolah.**

Dinas Pendidikan akan lebih fokus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam bidang pendidikan sehingga menciptakan insan yang berpendidikan dan kompetitif serta mensukseskan program wajib belajar 13 tahun memperluas pemerataan pendidikan, mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antar kelompok masyarakat serta meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa. Program ini memperluas cakupan dari sebelumnya 12 tahun menjadi 13 tahun, yang kini dimulai dari satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK, disusul

SD, SMP, hingga SMA/ sederajat. Kebijakan ini bertujuan memperkuat fondasi pendidikan sejak dini.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun anggaran 2025 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2026 yang tertuang dalam PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2026. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

A. Permasalahan

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dengan memperhatikan Renja dan DIPA tahun 2025 dengan 1(satu) sasaran strategis dan 17 indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut: ***“Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan”*** diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 134,97 % atau dikategorikan **sangat berhasil**.

Akumulasi tingkat capaian indikator kinerja rata-rata berdasarkan 1 (satu) sasaran strategis dan 17 indikator kinerja memperoleh nilai sebesar 134,97 %. **(sangat Baik).**

Dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa permasalahan dan pemecahan yang telah dan akan diambil untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut :

1. Masih terdapat Guru yang belum terlatih;
2. Terdapatnya kepala sekolah yang tidak defenitif alias status pelaksana tugas di satuan Pendidikan;
3. Kondisi sarana dan prasarana dengan masih kurang;
4. Kekurangan bahan belajar dan mengajar sekolah;
5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga akan berpengaruh kepada meningkatnya angka putus sekolah.;
6. Kurang meratanya penyebaran guru;
7. Partisipasi masyarakat tentang pendidikan di daerah ini dirasa relatif kurang, mungkin dilatarbelakangi oleh SDM dan sosial, budaya. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kinerja sasaran dan program.

B. SOLUSI

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2025, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan kompetensi Guru, Dinas Pendidikan akan lebih memperhatikan mutu Guru di Kabupaten Dairi dengan merancang Program kegiatan pelatihan Guru serta meningkatkan kompetensi Guru di Kabupaten Dairi. Hal ini juga dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini diharapkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang signifikan untuk peningkatan kompetensi guru, melakukan pelatihan guru serta pembinaan secara terus menerus dalam peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Dairi.
2. Untuk menurunkan angka putus sekolah, memerlukan pendekatan holistik, meliputi bantuan ekonomi, pendampingan siswa, dan pelibatan orang tua. Strategi utamanya mencakup peningkatan beasiswa (seperti PIP), perbaikan fasilitas di daerah terpencil, penguatan konseling (BK) untuk deteksi dini, serta penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif dan menyenangkan.

3. Dalam rangka meningkatkan mutu sarana prasarana dan pendukung lainnya Dinas Pendidikan sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pengadaan sarana prasarana penunjang berupa pengadaan TIK (chrome book) namun dikarenakan keterbatasan anggaran yang belum maksimal sarana prasarana dimaksud belum seluruhnya terpenuhi. Dinas Pendidikan akan lebih berupaya mencari dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Utara.
4. Memberikan penghargaan (reward) kepada Pegawai Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk membuat pegawai lainnya agar termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik Dan menunjukkan performa kinerja yang lebih baik, mengadakan program pelatihan bagi pegawai serta evaluasi dalam pengembangan sumber daya manusia di kops Dinas Pendidikan.
5. Untuk pemerataan tenaga pendidik khususnya di daerah terjauh, maka kedepan pengadaan dan pengangkatan guru P3K akan diprioritaskan ke daerah daerah terjauh dan berbasis kebutuhan. Dinas Pendidikan akan menyusun DAKL dan mengusulkan formasi sesuai kebutuhan.
6. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dinas pendidikan akan melibatkan seluruh stakeholder yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan karena pendidikan itu bukan saja tanggungjawab pemerintah tapi tanggung jawab kita bersama.